

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI

Henni Indriyani¹, Septiani Fransisca², M. Ridho Akbar³

Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Palembang

Sur-el: henni.indriyani@binadarma.ac.id¹, septiani.Fransisca@binadarma.ac.id²,
ridhoakbar11@yahoo.com³

Abstract: *Percentage of the servant expenditure against to total local expenditure in District/Municipality of Province of South Sumatera from 2011 until 2014 was 60 %. This case indicated that the most absorption of expenditure allocation in servant expenditure. Based on this data, this research was aimed to give empirical evidence about the influences of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fund (DAK) to the servant expenditure allocation. The analysis result showed that PAD and DBH had positive influence and significantly against to the servant expenditure in $\alpha = 5 \%$ whereas, analysis result of DAU and DAK showed that it had no significant influence against to the servant expenditure budgeting. This research conclusion was PAD and DBH gave influence against to the servant expenditure to district/municipality area in Province of South Sumatera.*

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, Servant Expenditure*

Abstrak: *Persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2011 hingga 2014 berjumlah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan sebagian besar alokasi belanja diperuntukkan untuk belanja pegawai. Berdasarkan data ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja pegawai. Hasil analisis menunjukkan PAD itu dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai, hasil analisis dari DAU dan DAK menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan penganggaran. Dalam penelitian ini PAD dan DBH berpengaruh terhadap ke belanja pegawai ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.*

Kata Kunci: *Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Belanja Pegawai*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhususan serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah.

Potensi daerah seperti dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di daerah tersebut. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran untuk Belanja Pegawai, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu sektor

yang paling dominan yang ada di setiap daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Sumatera Selatan 2010-2014

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Persentase
2011	7.577.804	13.701.480	55,3 %
2012	9.239.778	15.872.712	58,2 %
2013	11.805.736	19.771.436	59,7 %
2014	14.886.140	24.267.081	61,7 %

Sumber: Data diolah

Tabel 1 terlihat bahwa perbandingan antara belanja pegawai dengan total belanja daerah yang semakin meningkat. Meningkatnya alokasi belanja pegawai dikarenakan jumlah pegawai pemerintahan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah beranggapan dengan menambah jumlah pegawai pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, namun peningkatan alokasi belanja pegawai tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fenomena belanja pegawai juga terdapat pada kasus pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Pemekaran daerah seharusnya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak menambah inefisiensi biaya birokrasi lokal. Pada prakteknya, pemekaran daerah dapat menambah pengeluaran pada daerah otonom terutama alokasi belanja pegawai dari dana perimbangan

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data itu telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD yang diperoleh BPS (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan).

2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis kuantitatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku atau generalisasi (Sugiyono, 2012)

2.4 Uji Asumsi Klasik

2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas

Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode gletser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

2.4.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lainnya.

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-

Watson (d). Hasil perhitungan Durbin-Watson (d) dibandingkan dengan nilai d_{tabel} pada $\alpha = 0,05$. Table d memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas (d_U) dan nilai batas bawah (d_L) untuk berbagai nilai n dan k .

Jika $d < d_L$; maka terjadi autokorelasi positif

$d > 4 - d_L$; maka terjadi autokorelasi negatif

$d_U < d < 4 - d_U$; maka tidak terjadi autokorelasi

$d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$; maka pengujian tidak meyakinkan.

2.4.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar Variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang menilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Sanusi, 2011).

Pendeteksian terhadap multikolonieritas dapat dilakukan dengan nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat gejala multikolonieritas yang tinggi.

2.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis (H_a) metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, karena menyangkut lima variabel independen dan satu buah variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi berikut ini:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e \dots(1)$$

Keterangan:

Y = Belanja Pegawai

a = Konstanta

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 = Dana Bagi Hasil (DBH)

X4 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

b1 = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah

b2 = Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum

b3 = Koefisien Regresi Dana Bagi Hasil

b4 = Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus

e = Standar Error (Penggangu)

2.6 Tinjauan Pustaka

2.6.1 Teori Keagenan

Dalam sudut pandang keagenan sektor publik, legislatif yaitu DPRD berperan sebagai pihak prinsipal dan eksekutif yaitu pemerintah daerah berperan sebagai agen. Berdasarkan program yang akan dijalankan pemerintah daerah akan menyusun anggaran daerah. Sebagai pelayanan kepada publik, legislatif yaitu DPRD berperan sebagai agen sedangkan publik yaitu masyarakat berperan sebagai prinsipal. Sebagai perwakilan yang dipercaya masyarakat dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya, yaitu legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Legislatif akan menjadi agen ketika berhubungan dengan publik, tetapi di sisi lain legislatif akan menjadi prinsipal. Jadi legislatif mendapatkan tugas dari publik sebagai agen dan akan

memantau kinerja pemerintah daerah melalui anggaran sebagai pihak prinsipal.

2.6.2 Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintahan daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan (Herniati, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tertentu dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Besarnya kewenangan legislatif (*principal*) dalam proses penyusunan anggaran (Undang-Undang No.23/2014) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Dalam mengemukakan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami penurunan. Diduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD. *Spread* PAD merupakan selisih hasil dari pengalokasian daerah untuk pendidikan dan kesehatan terhadap belanja daerah. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi realisasi belanja pegawai

2.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pegawai. Secara spesifik mereka menegaskan variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima (Diah, 2011) sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *symmetric*. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja pegawai

2.7.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja pegawai di Provinsi Sumatera Barat (Diah, 2011). Berdasarkan landasan teoritis dan temuan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pegawai

2.7.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah yang diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja langsung pada pemerintah kabupaten di Indonesia. Secara simultan DAU, DAK, PAD, PDRB berpengaruh positif terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten di Indonesia. Kedua secara parsial DAU, DAK, PAD, berpengaruh terhadap belanja langsung, sedangkan PDRB tidak berpengaruh positif terhadap belanja langsung pemerintah provinsi di Indonesia (Diah, 2011). Berdasarkan landasan teoritis dan temuan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah distribusi dari variabel independen dan dependen terdistribusi normal atau tidak, karena model regresi dapat dikatakan baik apabila data terdistribusi normal atau mendekati Salah normal dan signifikansinya (di atas 0,05), hal ini berarti data residual

terdistribusi secara normal, dengan demikian dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi minoritas.

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	34.89776575
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil Uji Glejser di atas, dapat dilihat bahwa pada tabel Coefficients^a nilai sig. semua variabel independen lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Dengan demikian terpenuhilah asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas.

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

	Model	Sig.
1	(Constant)	.831
	Pendapatan Asli Daerah	.108
	DAU	.420
	DBH	.333
	DAK	.193

3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara variabel independen dalam penelitian. Untuk menguji terjadi atau tidak gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF atau *Variance Inflating Factor* dari hasil analisis regresi. Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinieritas yang tinggi. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	,409	2,442
Dana Alokasi Umum	,311	3,217
Dana Bagi Hasil	,949	1,054
Dana Alokasi Khusus	,601	1,663

a. Dependent Variable: Belanja Pegawai

Dari hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa angka tolerance Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X4) > 0,10. Hasil perhitungan tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel independen.

3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* adalah 2.180 dengan signifikansi 5 % jumlah unit analisis 24 (n) dan variabel independen 4 (k=4),di dapat nilai dL 1.283 dan dU 1,559. Oleh karena nilai Dw lebih besar dari dU dan kurang dari 4-dL ($4-1,283=2.717$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				Durbin-Watson
	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	,873 ^a	,762	,744	18690,25955	2,180

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Pegawai

3.5 Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Model Regresi

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Beta		
(Constant)	3660,052		,489	,627
Pendapatan Asli Daerah	,115	,370	3,597	,001
Dana Alokasi Umum	-,008	-,048	-,407	,686
Dana Bagi Hasil	,060	,750	11,10	,000
Dana Alokasi Khusus	,222	,161	1,897	,063

Sumber: Hasil output SPSS

3.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai

Dari hasil tabel 6, terbukti bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

akan meningkatkan alokasi belanja pegawai. Hal ini terbukti semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung dari pusat, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki dan akan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan perspektif teori keagenan dimana terdapat hubungan *spread* PAD antara pihak eksekutif dan legislatif untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, dimana posisi legislatif sebagai *principal* dan pihak eksekutif sebagai agen sehingga akan mempengaruhi pihak eksekutif untuk menaikkan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang mendukung kepentingannya yaitu dengan meningkatkan alokasi belanja pegawai Dengan demikian hipotesis PAD berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.

3.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Berdasarkan tabel 6, hasilnya tidak membuktikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka pengalokasian belanja pegawai akan semakin besar. Alasan DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja pegawai karena DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan

pun tidak terlalu besar sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian belanja pegawai. DAU juga dialokasikan kepada daerah tanpa memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang dialihkan kepada daerah yang sepenuhnya menjadi beban daerah.. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai.

3.5.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai

Berdasarkan tabel 6 yang dilakukan, telah terbukti bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh pemerintah daerah akan menetapkan belanja pegawai yang besar jika anggaran DBH besar, sebaliknya jika kecil belanja pegawai yang akan ditetapkan jika anggaran DBH kecil. DBH juga merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran dan Belanja daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi belanja pegawai dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran

khususnya mengenai belanja pegawai. Dengan demikian hipotesis DBH berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.

3.5.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai

Berdasarkan tabel 6 yang dilakukan, telah terbukti bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja pegawai. Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintahan kelautan dan perikanan. Pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mensejahterakan masyarakat misalnya dengan menambah jumlah guru di kabupaten yang masih memerlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menambah akses layanan umum seperti Rumah sakit dan menambah jumlah dokter untuk kabupaten yang masih kekurangan tenaga medis. Dengan demikian hipotesis DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.

4. SIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis pertama, ketiga dan keempat menunjukkan bahwa secara

parsial variabel PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai

Sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan PAD dengan cara lebih mengoptimalkan dalam memanfaatkan kekayaan daerah dan menggali potensi sumber daya alam yang ada, begitu juga dengan DBH dan DAK yang diterima pemerintah. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi belanja pegawai dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran khususnya mengenai belanja pegawai.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak jumlah sampel, menggunakan sektor-sektor lain sebagai objek penelitian dan menambahkan variabel-variabel lainnya, seperti derajat desentralisasi, luas wilayah dan pendapatan lain-lain. Peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

DAFTAR RUJUKAN

- Diah, Retno. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK terhadap Alokasi Belanja Daerah: Studi Kasus Pemerintah Provinsi se-Indonesia*. Jurnal Akuntansi. Vol. 2, No. 2, Hal.1-28.
- Herniati, Ayungnityas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelian Kuantitatif dan Kualitatif Ekonomi*. Penerbit ALFABETA. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.